

ARTIKEL JURNAL

PENGEMBANGAN MODEL RESOLUSI KONFLIK UNTUK MASYARAKAT MULTIKULTURAL (Studi Implementasi Kebijakan Resolusi Konflik di Sampit, Poso, dan Ambon)

Oleh Suharno, Samsuri, Iffah Nur Hayati

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian implementasi kebijakan resolusi konflik di Sampit Kalimantan Tengah untuk menghasilkan model kebijakan resolusi konflik multikultural yang bersifat permanen di Poso Sulawesi dan Ambon Maluku. Dalam penelitian ini dilakukan penyusunan model resolusi konflik berbasis politik rekognisi untuk menyelesaikan konflik multikultural di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya serta pengimplementasian model.

Penelitian dilaksanakan menggunakan metode kualitatif-naturalistik. Subjek penelitian adalah tokoh-tokoh dari etnis yang berkonflik di Kalimantan Tengah. Pengumpulan data menggunakan teknik; wawancara mendalam, dokumentasi, observasi, dipadukan dengan desain *focus group discussion* (FGD) terutama dalam mencari akar persoalan konflik antar etnis dan merumuskan model resolusi konflik berbasis politik rekognisi. Penelitian dilakukan dalam dua tahapan (dalam dua tahun), pertama meneliti akar-akar persoalan konflik etnis, menyusun kerangka model penyelesaian bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya atas konflik etnis. Tahap kedua implementasi model.

Hasil tahun pertama penelitian ini: *Pertama*, penyelesaian konflik di Sampit melalui Kebijakan Publik dalam bentuk perda secara partisipatif, dengan inisiatif-inisiatif kultural dari bawah, dan tekad kultural untuk hidup berdampingan secara damai telah menghasilkan penyelesaian konflik dengan tingkat keberhasilan yang secara relatif jauh lebih berhasil daripada Konflik Poso dan Ambon. Penyelesaian konflik di Ambon dan Poso belum sepenuhnya berhasil dan secara relatif berada di bawah tingkat keberhasilan penyelesaian Konflik Sampit. Konflik di Poso dan Ambon melibatkan inisiatif pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang sangat besar, bersifat *top-down* dan dipungkasi dengan pemilahan secara eksklusif aspek-aspek sosio-ekonomi dan domisili pihak-pihak yang berkonflik. *Kedua*, model penyelesaian konflik multikultural secara permanen yang dapat digunakan melalui belajar dari konflik di tiga daerah adalah model resolusi konflik dengan pendekatan politik rekognisi. Filosofi pendekatan ini adalah partisipatori, *from-bottom-initiative*, kebijakan publik sebagai mekanisme payung, inklusif, dan *peaceful co-existence*.

Kata kunci: *Konflik multikultural, resolusi konflik, politik rekognisi*

A. Latar Belakang

Indonesia sangat dikenal sebagai negara dengan masyarakat multikultural dan bahkan plural kultural. Kondisi seperti ini membawa konsekuensi baik sebagai daya pemecah (*sentrifugal*) yang menyimpan potensi konflik yang besar sehingga mampu menghancurkan hasil peradaban manusia maupun sebagai daya perekat atau penyatu (*sentripetal*) yang mampu melanggengkan tatanan kemasyarakatan yang telah lama dibentuk. Tetapi konsekuensi sebagai *sentrifugal* yang menyimpan potensi konflik ini di wilayah-wilayah “rawan konflik” untuk Kalimantan seperti di Sambas, Sampit, dan maupun wilayah Maluku, Poso dan Ambon justru lebih menonjol. Konflik antar etnis di Indonesia terutama di “wilayah-wilayah rawan konflik” tersebut terjadi secara terus berulang dalam siklus waktu yang berbeda. Paling tidak dari sejak tahun 1963 sampai 2000 saja konflik yang terjadi di Kalimantan antar berbagai etnis telah tercatat 12 kali.

Di Maluku, konflik juga terjadi berkali-kali secara berulang. Konflik pertama antar agama di Ambon pecah pada tanggal 9 Januari 1999 atau bertepatan dengan 1 Syawal 1999. Konflik bersifat massif, destruktif, dan eskalatif. Kerusuhan serupa berulang pada tahun 2001. Setelah itu muncul konflik yang sulit diredam. Pada 2011 kembali pecah konflik berupa kerusuhan antara kelompok masyarakat kristiani dan muslim. Konflik dan potensinya sesungguhnya masih terus membara dan dapat tersulut jika tidak dilakukan resolusi atau penyelesaian konflik secara lebih permanen.

Konflik yang mirip dengan tragedi Ambon juga terjadi di Poso. Konflik mula-mula pecah pada tahun 1998. Konflik terjadi berulang setelah itu. Hingga tahun 2012 pun, kerusuhan dan saling serang antar kelompok agama masih terjadi.

Konflik-konflik tersebut membutuhkan resolusi konflik yang tepat, memadai, dan komprehensif agar konflik-konflik tersebut tidak mengarah menjadi konflik yang massif, eskalatif dan destruktif. Sebab konflik yang demikian itu akan merugikan integrasi dan kohesi sosial di kalangan masyarakat, juga pada akhirnya akan merugikan bangsa dan negara, baik secara materiil maupun immaterial.

Dalam kerangka itu, dengan mengambil *setting* dan pelajaran dari pengalaman dan praktek penyelesaian konflik di tiga lokasi, yaitu Sampit, Ambon, dan Poso, tim peneliti telah melakukan penelitian dan menyusun model resolusi konflik multikultural.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif-naturalistik. Sebagai penelitian yang bersifat kualitatif, maka data yang dihasilkannya berupa data deskriptif, yaitu data yang berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sekalipun demikian, penelitian ini tidak menolak data yang bersifat kuantitatif. Data kuantitatif digunakan untuk memperkuat data yang bersifat kualitatif.

Subjek penelitian ini adalah tokoh-tokoh etnis, pejabat yang terlibat dalam pembuatan Perda untuk menyelesaikan Konflik Sampit, Poso, dan Sampit. Pengumpulan Data dalam penelitian ini dilakukan dengan: 1) Wawancara mendalam, 2) Dokumentasi, dan 3) Observasi.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Analisis data dimulai dengan menelaah data yang diperoleh dari berbagai sumber. Langkah berikutnya adalah dengan menggunakan reduksi data untuk memperoleh ikhtisar data. Selanjutnya, ikhtisar data dimasukkan ke dalam satuan-satuan kategori tertentu seperti dirumuskan dalam hipotesis dan diakhiri dengan penafsiran data.

C. Sekilas Konflik Sampit, Poso, dan Ambon

Fase perselisihan Konflik Sampit telah dimulai ketika para pendatang tiba di Sampit khususnya dan Kalimantan Tengah umumnya. Suku Dayak yang telah mendiami daerah tersebut selama berabad-abad sedikit demi sedikit perlahan namun pasti, tersingkir dari tanah yang mereka duduki dan dimanfaatkan baik oleh kepentingan orang per orang maupun untuk kepentingan skala organisasi dan perusahaan, baik yang dilakukan dengan sukarela maupun yang dilakukan karena berbagai tekanan, himbauan maupun bujukan.

Persinggungan dengan para pendatang, perasaan tersingkir dari tanah yang didiami secara turun temurun, menghadapi tuduhan dari berbagai pihak sebagai perusak lingkungan, pelaku penebangan liar, pencuri kayu dan sebagainya membuat perselisihan terus menerus antara Etnis Dayak dan etnis lainnya termasuk dan terutama Madura, antara etnis Dayak dengan Pemerintah yang dianggap bukan bagian dari mereka, antara etnis Dayak dengan para pengusaha hutan dan tambang dan juga antara etnis Dayak yang hidup di pinggiran atau di hutan dengan etnis Dayak yang sedikit banyak berusaha membaur dengan kehidupan yang mencoba menelan mereka dan menjelma menjadi Dayak kota yang lebih realistis.

Di antara perselisihan yang paling menonjol adalah dengan warga etnis Madura yang perangnya memang agak jauh berbeda dengan etnik-etnik lain seperti Jawa misalnya. Orang Jawa pandai membaur, dapat dengan cepat beradaptasi, tidak memiliki sejarah dan kultur kekerasan dan berusaha harmoni dengan alam lingkungan dan masyarakat sekitar. Orang Jawa biasanya sudi diperintah oleh orang dari etnis lain. Tidak ada hal yang tabu bagi mereka untuk tunduk pada siapapun pemimpin terutama ketika mereka menyadari bahwa mereka berada di perantauan dan memahami status mereka sebagai orang yang menumpang. Orang Jawa juga dikenal taat hukum dan peraturan. Kebanyakan orang Jawa juga terkenal memegang teguh adat istiadat Jawa/kejawaan yang merupakan sinkretisme Islam, Hindu, Budha dan hasil pemikiran manusia lainnya sehingga mereka dapat lebih memahami alam pikir orang Dayak.

Sementara Madura dapat dikatakan sebaliknya. Alam mendidik mereka keras, cenderung tega, susah diatur dan tidak mau tunduk pada perintah orang lain kecuali pada pemimpin dari kalangan mereka dan kyai. Sekalipun banyak diantara warga etnis Madura tidak melakukan kewajiban-kewajiban dasar agama Islam namun mereka sangat bangga dan fanatik dengan Islam bahkan seringkali juga berlebih-lebihan. Tidak terbayang bahwa orang Madura mau diperintah oleh orang Dayak yang dianggap mereka bodoh, terbelakang, tidak beradab bahkan tidak beragama/musyrik karena begitu kuat berpegang teguh dengan adat-istiadat yang masih kental dengan kepercayaan pagan animisme/dinamisme. Dengan

demikian bibit dan sumber perselisihan telah menyebar dalam masyarakat dengan bertemunya dua etnis dan dua kebudayaan yang secara sepintas lalu saling bertolak belakang. Dalam tahapan ini perselisihan dan silang sengketa menjadi tidak terhindarkan, yang meliputi: 1) Fase krisis (*crisis phase*), 2) Fase kekerasan terbatas (*limited violence phase*), 3) Kekerasan massal (*massive violence phase*), 4) Fase penenangan (*abatement phase*), dan 5) Fase penyelesaian damai (*settlement phase*).

Sedangkan Konflik Poso, dari sisi waktu, dapat dikategorikan pada beberapa gelombang konflik, yaitu I (tahun 1998 dan tahun 1999), II, III, IV (tahun 2000), V (tahun 2001 sebelum Perjanjian Malino I), dan VI (setelah Perjanjian Malino I). Awal mula kejadian yang memicu Konflik di Poso menjadi perdebatan berbagai kalangan. Namun, merujuk pada hasil penelitian LIPI, konflik Poso dimulai pada 24 Desember 1998, di sebuah Malam Natal dan bulan Ramadan. Konflik dimulai dengan adanya pemuda Kristen yang mendatangi masjid Darussalam di kampung Sayo dan memukul seorang pemuda di dalam masjid pada tengah malam tanggal 24 Desember menjelang dini hari tanggal 25 Desember.

Kejadian tersebut membuat umat Muslim merasa terancam dan mereka menyerang rumah warga Kristen. Berita ini cepat tersebar dan banyak orang berusaha masuk kota Poso dari daerah sekelilingnya. Umat Muslim datang dari Tokorondo, Parigi dan Ampana, sedangkan umat Kristen yang dipersenjatai parang datang dari Sepe, Silanca dan Tentena. Kerusuhan berlanjut hingga tanggal 29 Desember, meluas melewati perbatasan kota dan masuk ke kota-kota di sepanjang 3 jalan jalur utama. Kekerasan selama seminggu tersebut dapat kita sebut sebagai gelombang pertama konflik Poso.

Setelah kekerasan selama seminggu tersebut, konflik memasuki gelombang kedua yang diwarnai dengan penurunan eskalasi konflik. Situasi tersebut disebabkan oleh adanya pemilihan umum nasional di Juni 1999 dan pemilihan bupati di Oktober 1999, di mana elite politik berusaha mendapatkan dukungan dari kedua komunitas. Hanya ada beberapa serangan yang dilakukan baik oleh umat Kristen maupun Muslim hingga April 2000.

April 2000 merupakan awal gelombang ketiga konflik Poso. Pada 16 April 2000, terjadi perkelahian Antara pemuda Muslim dan Kristen di terminal bis Poso di kampung Lombogia, daerah yang di dominasi umat Kristen. Umat Muslim mulai menyerang rumah di Lombogia dan membakar gereja utamanya. Umat Kristen juga melakukan serangan balasan.

Gelombang keempat konflik Poso dimulai di bulan Mei 2000, yang ditandai dengan organisasi serangan yang lebih sistematis. Kelompok Kristen yang dikenal sebagai Pasukan Kelelawar atau ninja yang dipimpin oleh Fabianus Tibo membunuh 3 orang di kampung Mo-Engko. Kekerasan meningkat secara signifikan ketika serangan dilakukan ke kampung Situwu Lemba, atau dikenal sebagai Kilo Sembilan. Kelurahan ini adalah daerah transmigrasi suku Jawa Muslim dan mempunyai pesantren bernama Wali Songo. Sekitar 70 orang dibunuh atau hilang dalam penyerangan tersebut. Kota Poso menjadi target dan membuat banyak Muslim mengungsi dari kota. Penyerangan Kilo Sembilan memicu umat Muslim disekitarnya untuk angkat senjata. Hal ini juga membuat tentara Indonesia menurunkan lebih banyak anggotanya.

Gelombang V konflik Poso menandai keterlibatan anasir eksternal konflik. Pada Agustus 2000, keterlibatan Presiden Abdurrahman Wahid dalam pertemuan damai yang dikenal sebagai Rujuk Sintuwu Maroso yang diikuti oleh 14 ketua adat dari kabupaten Poso tidak banyak membantu memulihkan keadaan. Inisiatif ini diselenggarakan oleh pemerintah provinsi, pejabat kabupaten Poso dan 4 Gubernur di Sulawesi tersebut tidak membawa hasil signifikan.

Pada April 2001, kemarahan yang memuncak dari komunitas Muslim terlihat dengan permintaan mereka untuk hukuman mati atas tiga orang Kristen, yaitu Fabianus Tibo, Marinus Riwu dan Dominggus Dasilva, yang dituduh terlibat dalam penyerangan Kilo Sembilan. Kelompok ekstrim dari luar Poso juga mengeluarkan amarahnya dan pada Juli 2001, beribu-ribu anggota Laskar Jihad, yaitu kaum militan Muslim yang berbasis di Jawa, mulai tiba di Poso. Keterlibatan mereka di konflik ini mengubah eskalasi konflik. Kehadiran mereka memberikan tambahan energi yang signifikan untuk umat Muslim, yang menyerang dan membakar perkampungan Kristen disekitar kota Poso. Konflik,

karenanya, menjadi cenderung berpihak pada aktivitas kelompok muslim. Pada Desember 2001, serangan yang dikoordinasi oleh kelompok-kelompok Muslim terjadi di beberapa kampung, dari Betalembah ke Sanginorasaat yang sama,

Gelombang berikutnya adalah Pasca Perjanjian Malino yang digagas oleh Pemerintah dan ditandatangani pada tanggal 21 Desember 2001 oleh para pemimpin Muslim dan Kristen. Deklarasi tersebut menyerukan semua pihak untuk mengakhiri semua kekerasan, dan walaupun ada kekurangannya, mempunyai beberapa hasil. Bentrokan langsung antara dua komunitas ini berkurang, walaupun kadang-kadang masih terjadi pemboman dan penembakan yang sebagian besar dilakukan oleh kelompok Muslim. Ketiga orang Kristen yang dicurigai melakukan penyerangan Kilo Sembilan diadili pada September 2006, yang akhirnya memicu protes yang berakibat kekerasan. Meski demikian, secara umum konflik mereda.

Sepuluh poin dalam Deklarasi Malino I

1. Menghentikan semua bentuk konflik dan perselisihan.
2. Menaati semua bentuk dan upaya penegakkan hukum dan mendukung pemberian sanksi hukum bagi siapa saja yang melanggar.
3. Meminta aparat negara bertindak tegas dan adil untuk menjaga keamanan.
4. Untuk menjaga terciptanya suasana damai, menolak memberlakukan darurat sipil serta campur tangan pihak asing.
5. Menghilangkan seluruh fitnah dan ketidakjujuran terhadap semua pihak dan menegakkan sikap saling menghormati dan memaafkan satu sama lain, demi terciptanya kerukunan hidup bersama.
6. Tanah Poso adalah bagian integral dari Republik Indonesia. Karena itu, setiap warga negara memiliki hak untuk hidup, datang, dan tinggal secara damai dan menghormati adat istiadat setempat.
7. Semua hak-hak dan kepemilikan harus dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, sebagaimana adanya sebelum konflik dan perselisihan berlangsung.
8. Mengembalikan seluruh pengungsi ke tempat asal masing-masing.
9. Bersama pemerintah melakukan rehabilitasi sarana dan prasarana ekonomi secara menyeluruh.
10. Menjalankan syariat agama masing-masing dengan cara dan prinsip saling menghormati dan menaati segala aturan yang telah disetujui, baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan pemerintah dan ketentuan lainnya.

Keberhasilan mengurangi kekerasan ini sebagian dikarenakan petugas keamanan, yang setelah Malino I menjadi makin bertekad untuk menahan mereka yang melakukan penyerangan. Pemisahan komunitas tersebut—di mana Muslim

berpusat disekitar Poso dan Kristen disekitar Tentena—juga telah mengurangi kemampuan untuk melakukan penyerangan. Meskipun demikian, pemisahan tersebut telah menjadi masalah tersendiri karena selalu menyimpan potensi konflik, meskipun tidak selalu manifes. Namun demikian, kekerasan masih berlangsung secara incidental hingga tahun-tahun terakhir ini, walaupun aparat keamanan selalu melokalisasi isu pada terorisme.

Untuk menyederhanakan pemahaman mengenai kronologi konflik Poso, peneliti mengutipkan pada bagian ini grafik kronologi konflik dari LIPI (2011: 55). Walaupun begitu, pentahapan konflik dalam table berikut berbeda dengan yang digunakan oleh peneliti pada bagian ini.

Tahap pertama		
1998	Desember	Kerusuhan dimulai waktu malam Natal, selama bulan Ramadan, berlangsung selama 3 hari.
1999	Juni	Pemilihan Umum di Indonesia.
	Oktober	Kabupaten Morowali dibentuk dari sebagian kabupaten Poso. Bupati dan wakil bupati baru dipilih, dan keduanya adalah Muslim.
		Herman Parimo, seorang pemimpin Kristen yang disegani, dibawa ke pengadilan dan dihukum penjara 15 tahun atas perannya memprovokasi konflik pada 1998.
		Agfar Patangs, adik dari bupati Anil Patangs dihukum 6 bulan penjara untuk perannya.
		Yahya Patiro, calon bupati, di serang di Hotel Wisata di kota Poso.
Tahap kedua		
2000	April	Perkalahian antara pemuda Muslim dan Kristen dimulai di terminal bus Poso di Lombogia, berkembang menjadi kerusuhan yang membuat sejumlah besar umat Kristen mengungsi.
Tahap ketiga		
2000	Mai	Sekelompok Kristen yang dipimpin oleh Fabianus Tibo menuju kota Poso dan membunuh 3 orang di kampung Mo-Engko. Sebuah pesantren di Kilo Sembilan diserang, mengakibatkan lebih dari 70 orang wafat. Banyak orang yang mengungsi dari kota Poso.
	Juni	Konflik menyebar luas keseluruh Poso.
	Agustus	Presiden Wahid mengunjungi Poso. Upacara Rujuk Sintuwu Maroso untuk rekonsiliasi diadakan.
2001	April	Umat Muslim meminta hukuman mati untuk 3 orang Kristen yang dituduh terlibat dalam serangan di Kilo Sembilan.
	Juni	3 orang Kristen yang terlibat dalam serangan di Kilo Sembilan dibawa ke pengadilan.
Tahap keempat		
2001	Juli	Umat Kristen bergerak dari Tentena ke Poso menuntut agar tanah mereka dikembalikan ke mereka. Serangan di Buyung Katodo menyebabkan 14 orang Muslim meninggal, memicu pembalasan dari umat Muslim di kota Poso. Laskar Jihad tiba di Poso.
Tahap kelima		
2001	Desember	Penduduk kampung Tabalu menyerang kampung-kampung dari Batakembah sampai Sanginora. Deklarasi Damai Malino (Malino I) di negosiasi.
Tahap setelah Malino I		
2002		Ledakan bom dan serangan tembakan terjadi secara tersebar di kabupaten Poso sepanjang tahun.
2003	Desember	Kabupaten Tojo una-una dibentuk dari bagian kabupaten Poso.
2003–2004		Beberapa serangan misterius terjadi di beberapa kampung. Pemboman terjadi di Poso.
2005	Mai	Sebuah bom meledak di sebuah pasar di Tentena, merupakan serangan terbesar dijenisnya.
	Agustus	Sebuah serangan misterius terjadi di kampung Sapo-Silanca menyebabkan lima orang meninggal.
	Oktober	Tiga pelajar SMA Kristen dipanggil kepalanya.
2006	September	Pemimpin Kristen, Fabianus Tibo dan dua orang lainnya yang dituduh memimpin serangan Kilo Sembilan, dijatuhi hukuman.
	Oktober	Polisi mengumumkan daftar 29 orang yang diduga terlibat konflik.
2007	Januari	Operasi pertama dan kedua polisi terhadap kelompok teroris dilakukan.

Tabel 1. Kronologi Konflik Poso

Sedangkan Konflik Ambon yang bersifat eskalatif dan massif bermula pada tanggal Januari 1999. Konflik pertama-tama dipicu oleh kejadian pertengkaran personal antara seorang sopir angkutan umum dan seorang pemuda yang sudah dianggap biasa oleh masyarakat Ambon pada umumnya. Ada dua versi, dari Islam dan Kristen, yang beredar di masyarakat. Pertengkaran personal ini kemudian meluas menjadi pertikaian antar kelompok agama dan suku yang meledak menjadi kerusuhan.

Seorang saksi korban, warga Muslim di kampung Batu Merah Dalam, menyatakan bahwa sekitar pukul 15.30, 9 Januari 1999 dia tak memperhatikan sama sekali apa yang sebenarnya terjadi, karena pertengkaran kecil-kecilan antara warga Muslim dan Kristen sudah begitu biasa. Tapi pada pukul 16.00, serombongan besar massa datang dan menyerang. Mereka menyeberang jembatan dan masuk ke kampung dalam jumlah besar. Amir mengatakan dia tinggal di kampung Batu Merah seumur hidupnya, dan dia hampir mengenal semua wajah warga kampung itu. Tapi dia sama sekali tidak mengenal wajah orang yang memimpin rombongan besar massa penyerang itu. Dia yakin orang itu bukan orang Batu Merah. Sekitar lima orang di muka rombongan itu mengenakan kain putih pada lengan mereka. Amir lalu menelpon ke pihak polisi militer, tapi mereka menjawab bahwa mereka sudah menyerahkan persoalan itu ke polisi biasa. Mereka sendiri mengatakan tidak bisa berbuat apa-apa, karena hari itu hari libur lebaran, tidak ada orang masuk kerja. Amir mengatakan, di antara rombongan massa itu dia melihat sekitar 10 orang intel berpakaian preman. Seorang di antaranya meletuskan tembakan ke udara, tetapi tidak ada hasil. Rombongan massa itu terus maju.

Rombongan massa berhenti di depan bengkel mobil yang terletak di bagian bawah dari rumahnya. Mereka rupanya menemukan kain-kain lap kotor berlumuran minyak. Mereka menyulut kain-kain itu, lalu dengan menggunakan parang-parang panjang, mereka menyulut bagian-bagian lain dari bengkel sehingga api masuk ke dalam rumah. Rumah Amir juga dibakar sampai rata dengan tanah, seperti semua rumah yang ada di Batu Merah. Orang-orang itu juga

berteriak bahwa mesjid Batu Merah sudah dibakar, meskipun sebetulnya mesjid itu belum tersentuh sama sekali.

Tiga tahun setelah konflik ditandatangani Perjanjian Malino untuk Maluku, pada tanggal 12 Februari 2002. Berikut isi perjanjian tersebut.

“Perjanjian Malino untuk Maluku”

Konflik Maluku yang sudah berlangsung tiga tahun terakhir telah menyebabkan korban jiwa dan harta, kesengsaraan dan kesulitan masyarakat serta membahayakan keutuhan negara RI, serta menyuramkan masa depan rakyat Maluku. Oleh karena itu, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, kami segenap wakil dari umat Islam dan Kristiani Maluku dengan jiwa terbuka dan hati yang ikhlas sepakat untuk mengikat diri dalam perjanjian:

1. Mengakhiri semua bentuk konflik dan perselisihan.
2. Menegakkan supremasi hukum secara adil dan tidak memihak. Karena itu, aparat harus bertindak profesional dalam menjalankan tugasnya.
3. Menolak segala bentuk gerakan separatis termasuk Republik Maluku Selatan.
4. Sebagai bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka bagi semua orang berhak untuk berada dan berusaha di wilayah Maluku dengan memperhatikan budaya setempat.
5. Segala bentuk organisasi, satuan kelompok atau laskar bersenjata tanpa izin di Maluku dilarang dan harus menyerahkan senjata atau dilucuti dan diambil tindakan sesuai hukum yang berlaku. Bagi pihak-pihak luar yang mengacaukan Maluku, wajib meninggalkan Maluku.
6. Untuk melaksanakan seluruh ketentuan hukum, maka perlu dibentuk tim investigasi independen nasional untuk mengusut tuntas peristiwa 19 Januari 1999, Front Kedaulatan Maluku, Kristen RMS, Laskar Jihad, Laskar Kristus, dan pengalihan agama secara paksa.
7. Mengembalikan pengungsi secara bertahap ke tempat semula sebelum konflik.
8. Pemerintah akan membantu masyarakat merehabilitasi sarana ekonomi dan sarana umum seperti fasilitas pendidikan, kesehatan dan agama serta perumahan rakyat agar masa depan seluruh rakyat Maluku dapat maju kembali dan keluar dari kesulitan. Sejalan dengan itu, segala bentuk pembatasan

ruang gerak penduduk dibuka sehingga kehidupan ekonomi dan sosial berjalan dengan baik.

9. Dalam upaya menjaga ketertiban dan keamanan seluruh wilayah dan masyarakat, diharapkan adanya kekompakan dan ketegasan untuk TNI/Polri sesuai fungsi dan tugasnya. Sejalan dengan itu, segala fasilitas TNI segera dibangun kembali dan dikembalikan fungsinya.
10. Untuk menjaga hubungan dan harmonisasi seluruh masyarakat, pemeluk agama Islam dan Kristen maka segala upaya dan usaha dakwah harus tetap menjunjung tinggi undang-undang dan ketentuan lain tanpa pemaksaan.
11. Mendukung rehabilitasi khususnya Universitas Pattimura dengan prinsip untuk kemajuan bersama. Karena itu, rekrutmen dan kebijakan lainnya dijalankan secara terbuka dengan prinsip keadilan dan tetap memenuhi syarat keadilan.

Perjanjian ini kami buat dengan tulus dengan tekad menjalankannya secara konsekuen dan konsisten. Bagi pihak-pihak yang melanggar dan tidak menjalankan perjanjian ini akan diproses secara hukum. Tindak lanjut perjanjian ini akan dijalankan dengan agenda serta rencana sebagai berikut:

- I. Komisi Keamanan dan Penegakan Hukum,
- II. II. Komisi Sosial Ekonomi

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Malino, 12 Februari 2002.

Pada tahun 2011 yang lalu, konflik horizontal kembali terjadi di Ambon dimana ada dua kelompok bertikai sehingga mengakibatkan kerusakan. Penyebab Kerusakan menurut Kepolisian RI dipicu oleh kecelakaan tunggal yang dialami seorang warga, lalu si pengemudi diamuk kelompok massa tertentu.

Berikut kronologi Kerusakan Ambon 2011 versi Polri:

- Kerusakan bermula dari kecelakaan yang terjadi pada seorang tukang ojek bernama Darkin Saimen. Ia mengalami kecelakaan tunggal. Darkin Saimen yang mengendarai sepeda motor dari arah stasiun TVRI, Gunung Nona, menuju pos Benteng.
- Di daerah sekitar tempat pembuangan sampah, yang bersangkutan hilang kendali dan menabrak pohon gadihu. Ia kemudian menabrak rumah seorang warga di sana bernama Okto.

- Nyawa tukang ojek itu tak terselamatkan sebelum sampai ke rumah sakit. Hal inilah yang menimbulkan dugaan ia sebenarnya dibunuh, bukan karena kecelakaan.
- Lalu, ia diisukan dibunuh. Padahal, ia mengalami kecelakaan. Hasil otopsi dari dokter di sana bilang, dia kecelakaan murni. Berdasarkan keterangan saksi dan hasil otopsi, semua tidak ada tanda-tanda kekerasan.
- Pertikaian akibat kematian pria tersebut, terjadi antara dua kelompok massa dengan identitas berbeda. Mereka adalah “dua kelompok lama”. Mereka saling melempar batu dan merusak sejumlah fasilitas.
- 1 orang meninggal akibat kerusakan tersebut, akibat kerusan itu juga, penduduk yang ada di sekitar kerusakan memilih untuk mengungsi mencari tempat yang aman.
- Hingga kini, letupan-letupan konflik Ambon juga masih terjadi.

D. Resolusi Konflik di Sampit

Jika dilihat dari isi atau ketentuan-ketentuan dalam Perda, maka dapat disebutkan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Perda tersebut menuju tercapainya penyelesaian konflik dan penciptaan perdamaian. Beberapa konten pokok yang berkontribusi pada penyelesaian konflik dan preservasi suasana damai pasca konflik yang terjadi adalah sebagai berikut:

- 1) Pemulangan Etnis Madura dari pengungsian, hidup berdampingan dan saling menjunjung prinsip kesetaraan.
- 2) Pembinaan mental dan pendidikan untuk menghilangkan trauma pasca konflik serta keterbelakangan.
- 3) Penataan Pemukiman dan penghindaran pemukiman bergerombol berdasarkan etnis tertentu.
- 4) Tidak saling menuntut, termasuk warga Etnis Madura tidak menuntut ganti rugi pengembalian atas assetnya yang dikuasai oleh Etnis Dayak.

Dari situ dapat ditarik suatu pemahaman bahwa keberadaan dan kelahiran

Perda Kotawaringin Timur tentang Penanganan Penduduk Dampak Konflik Etnis dengan berbagai ketentuan yang terkandung di dalamnya dan juga dinamika proses pembentukannya yang lalu diikuti dengan implementasinya telah berhasil menyelesaikan konflik etnik di Sampit, Kotawaringin Timur dengan mengakomodasi kepentingan warga Dayak sebagai pihak yang ‘menang’ dalam ‘perang’ tersebut tanpa menihilkan atau menafikan hak warga Madura yang terusir dari Sampit dan ingin kembali ke wilayah tersebut.

Berbagai hal yang merupakan peninggalan atau sisa-sisa konflik seperti keinginan warga Madura untuk kembali ke Sampit dan penolakan warga Dayak berhasil di selesaikan dengan formulasi ‘boleh kembali bersyarat’, emosi dan dendam yang masih tersimpan akibat sikap dan tindakan tercela, kurang patut atau tidak menghormati adat istiadat, arogansi dan sebagainya dijawab dengan suatu rumusan bahwa warga Madura jika ingin kembali harus berjanji untuk menaati adat istiadat yang tidak bertentangan dengan keyakinan beragama. Selaras dengan ini pembinaan keagamaan juga diadakan agar lebih mampu bertoleransi dan memahami pluralitas. Selain itu untuk memastikan penghormatan dan penataan terhadap adat istiadat yang berlaku, peranan damang Kepala Adat dipertegas dalam Perda ini sehingga penjatuhan sanksi terhadap mereka-mereka yang bersalah secara adat dapat dilakukan oleh Damang yang bukan hanya sebagai lembaga informal namun merupakan bagian dari Pemerintah Daerah Kotawaringin Timur.

Masalah aset, penguasaan dan pendudukannya yang merupakan salah satu sisa konflik yang cukup rumit untuk diselesaikan namun dapat dipecahkan dengan dimuatnya pengaturan dalam Bab tersendiri mengenai penguasaan kembali aset tersebut.

Dengan cara-cara tersebut, Perda terbukti sebagai alat untuk menyelesaikan konflik etnik yang terjadi antara Etnis Dayak dan Madura. Sisa-sisa kekerasan antar etnik yang dipandang sebagai kekejaman abad ini, berhasil secara mulus dinetralisir sehingga kecemasan yang muncul akibat rentannya masalah-masalah yang belum terpecahkan tersebut menjadi tidak beralasan.

Dengan demikian, Perda dapat disebut sebagai alat utama atau senjata

pamungkas penyelesaian konflik etnis di Sampit Kotawaringin Timur. Perda menjadi sentral dari upaya penyelesaian secara komprehensif konflik yang telah berurat berakar antara warga Madura dan warga Dayak. Ia mampu mengintegrasikan kembali Etnis Dayak dan Madura dalam suatu wilayah dimana wilayah itu pernah menjadi ladang kerusuhan yang sangat dahsyat, yang menyebabkan salah satu pihak terusir secara keseluruhan dari wilayah tersebut tetapi kemudian kembali lagi dengan penerimaan oleh mereka yang pernah melakukan pengusiran. Hal ini tidak dapat disaksikan di tempat lain. Peristiwa kerusuhan di Ketapang, Kalimantan Barat, misalnya, hingga saat ini belum ada warga Madura yang berani kembali ke daerah tersebut karena keamanan mereka sama sekali tidak terjamin. Kerusuhan Ambon telah mengubah komposisi penduduk dari wilayah-wilayah tersebut bahkan secara tidak langsung telah berakibat pada lahirnya Provinsi Maluku Utara yang didominasi Muslim.

Dari pembahasan tersebut tampak jelas bahwa Perda merupakan kebijakan publik yang membawa eskalasi konflik pada titik yang sangat minimal. Poin-poin kelebihan Perda sebagai instrumen utama resolusi konflik, yang secara makro patut dicatat sebagai keberhasilan, adalah:

1. Perda merupakan gabungan antara pendekatan kemanusiaan dengan pendekatan keamanan.
2. Perumusan Perda ini benar-benar melalui suatu proses yang sedemikian partisipatif dengan mengintrodusir hasil-hasil dari berbagai musyawarah dan kongres dengan diberi penekanan sedemikian rupa sehingga sulit bagi para pihak untuk mengingkari atau menabraknya dengan alasan tidak sesuai dengan aspirasi atau kehendak kecuali bahwa para pihak tersebut dapat dianggap berpaling dari kata-katanya sendiri.
3. Penyusunan Perda ini telah memenuhi tahapan-tahapan proses perumusan kebijakan yang baik dengan melewati berbagai proses konsultasi, konfirmasi dan persuasi dengan tokoh-tokoh adat yang berada di pedalaman dan tokoh nasional yang berada di puncak kekuasaan.

Jadi point terpenting atas keberhasilan Perda ini adalah bahwa sesungguhnya Perda ini merupakan formalisasi hasil musyawarah-musyawarah internal etnik dan antar etnik terlebih khusus Dayak dan Madura sebagai pihak yang berkonflik. Masyarakat sudah mencapai konsensus perdamaian, sehingga sebenarnya keseluruhan isi Perda merupakan formulasi yang telah menjadi kesepahaman antar pihak untuk saling menghormati, memberi dan menerima dari adanya tuntutan atas hak dan kewajiban masing-masing pihak. Namun demikian Perda tetap mutlak diperlukan kehadirannya karena dapat memberi jaminan legalitas formal kepada masing-masing pihak dalam mentaati kesepahaman tersebut.

Secara umum, terdapat beberapa poin catatan kunci penyelesaian konflik di Sampit Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah:

- a. Perumusan Peraturan Daerah diawali dengan penyelesaian konflik secara kultural oleh para pihak yang berkonflik (dalam hal ini warga etnis Madura dan Dayak). Kongres masyarakat Dayak serta negosiasi dan komunikasi-komunikasi kultural antara elemen damai kedua belah pihak menyiratkan bahwa proses kultural merupakan pijakan fundamental untuk proses pengambilan kebijakan publik oleh aparaturnya di tingkat lokal.
- b. Penyelesaian konflik secara kultural melibatkan aktor-aktor kunci di kedua belah pihak yang difasilitasi oleh aparat pemerintahan di daerah. Aktor-aktor kunci yang moderat dan pro damai terlibat secara langsung dalam pengambilan inisiatif membangun suasana damai di daerah konflik.
- c. Substansi resolusi konflik di level bawah yang kemudian diperkuat dengan kebijakan publik berupa Peraturan Daerah komprehensif, meliputi: 1) pengakuan (rekognisi) antar pihak atas eksistensi masing-masing sesuai dengan identitas asli mereka, 2) komitmen untuk mengembangkan hidup berdampingan satu sama lain secara damai (*peaceful co-existence*), 3) langkah-langkah nyata dan konkrit untuk pemulihan keadaan pasca konflik antar etnis seperti pengembalian pihak yang terlibat langsung dalam konflik serta warga yang terdampak dengan terjadinya konflik pada posisi semula mereka, baik secara sosial maupun geografis.

- d. Seluruh tahapan-tahapan pokok penyelesaian konflik di Sampit diselenggarakan di Sampit juga, yang menunjukkan kesungguhan dan komitmen sejati dan tulus para pihak yang terlibat untuk menyelesaikan konflik di Sampit.

E. Penyelesaian Konflik Poso

Beberapa langkah penyelesaian konflik Poso telah di tempuh. Beberapa yang menonjol adalah sebagai berikut:

1. *Rujuk Sintuwu Maroso* atau ‘Membangun Kesatuan yang Kuat’. Pada 22 Agustus 2000, Presiden Wahid datang ke Poso dan kesepakatan Rujuk Sintuwu Maroso dibacakan didepan Presiden.
2. Deklarasi Damai Malino pada Desember 2001, atau sering disebut sebagai Malino I. Dari sejak dimulai hingga selesainya, keseluruhan proses ini memakan waktu kurang dari dua bulan. Deklarasi ini merupakan inisiatif dari Pemerintah Pusat.
3. Instruksi Presiden No.14/2005 yang menekankan pendekatan yang terkoordinasi dan komprehensif untuk menyelesaikan konflik Poso dengan melaksanakan Deklarasi Malino. Hal ini menunjukkan bahwa Deklarasi Malino masih jauh dari hasil yang diinginkan.

Prakarsa LSM kedua belah pihak yang berkonflik juga memberikan sumbangsih terhadap resolusi konflik. Antara lain dengan membentuk POKJA-RKP (kelompok kerja rekonsiliasi konflik Poso) yang pada awalnya berbasis di Palu. POKJA-RKP melakukan beberapa beberapa aktivitas di Palu sebelum Malino I, termasuk menjadi tempat netral untuk kedua belah pihak yang berselisih untuk berbicara satu sama lain. Hal ini membangun kesadaran yang lebih besar di Palu mengenai situasi di Poso dan meningkatkan keyakinan mereka yang terlibat konflik untuk berbicara mengenai masalahnya. Namun, kerja-kerja Pokja ini tidak cukup berhasil karena dilakukan dari Palu dan bukan dari Poso sendiri. Akhirnya kelompok kerja ini menjadi Pusat Rekonsiliasi Konflik Poso (PRKP) dan memindahkan basis aktivitasnya ke Poso.

Secara umum, komparatif dengan apa yang terjadi di Sampit, terdapat beberapa poin catatan kunci resolusi konflik Poso:

- a. Proses resolusi konflik tidak berbasis pada proses kultural antar elemen multikultural yang berkonflik, sehingga berbagai kesepakatan penyelesaian konflik lebih bersifat formal, “hitam di atas putih”, dan tidak berakar. Proses resolusi konflik seperti ini jelas merupakan kerentanan, apalagi sumber utama konflik sesungguhnya berada pada tataran kultural, khususnya bersumber dari sentimen *living values* (baca: agama) dari para pihak yang terlibat dalam konflik.
- b. Penyelesaian konflik dilakukan dengan bersandar pada mekanisme keperdataan melalui perjanjian, bukan mekanisme penyelesaian secara publik melalui kebijakan publik. Mekanisme penyelesaian konflik secara keperdataan melalui perjanjian (apalagi dilakukan oleh elit yang tidak berkaitan langsung dengan konflik) rawan penyelewengan dan pengingkaran. Prinsip pokok perjanjian keperdataan adalah “*pacta sunt servanda*”, artinya perjanjian hanya mengikat para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Ruang keterlibatan negara dalam penegakan aturan-aturan perjanjian damai dengan demikian menjadi terbatas. Berbeda misalnya jika proses penyelesaian dalam bentuk kebijakan publik, seperti Peraturan Daerah di tingkat Kabupaten/Kota atau di tingkat Provinsi).
- c. Inisiatif dan prakarsa penyelesaian konflik bersumber dari pejabat pemerintah pusat.
- d. Penyelesaian konflik tidak melibatkan aktor-aktor kunci yang merepresentasikan berbagai pihak yang terlibat dalam konflik, baik aktor internal maupun aktor eksternal.
- e. Tahapan-tahapan pokok dalam penyelesaian konflik tidak konkrit sehingga langkah-langkah pemulihan di lapangan tidak seperti yang digambarkan dalam naskah Perjanjian Damai.
- f. Pemisahan kampung Muslim dan Kristen (secara *by design* maupun insidental)—penduduk Muslim di Poso dan Kristen di Tentena, telah

menyebabkan isolasi kultural dan peningkatan intensitas eksklusivitas masing-masing pihak.

F. Penyelesaian Konflik Ambon

Sebagaimana telah diulas di muka, Konflik Ambon belum sepenuhnya selesai dan reda. Hingga saat ini letupan-letupan sisa konflik masih terus terjadi dan potensial menjadi sebuah ledakan konflik yang cukup besar. Hal itu menunjukkan bahwa proses dan implementasi resolusi konflik yang telah dilakukan di Ambon belum berhasil sepenuhnya, untuk tidak mengatakan resolusi konflik tersebut gagal.

Secara umum, komparatif dengan apa yang terjadi di Sampit, terdapat beberapa poin catatan kunci resolusi konflik Ambon: *Pertama*, proses resolusi konflik tidak berbasis pada proses kultural antar elemen multikultural yang berkonflik, sehingga berbagai kesepakatan penyelesaian konflik lebih bersifat formal, “hitam di atas putih”, dan tidak berakar. Proses resolusi konflik seperti ini jelas merupakan kerentanan, apalagi sumber utama konflik sesungguhnya berada pada tataran kultural, khususnya bersumber dari sentimen *living values* (baca: agama) dari para pihak yang terlibat dalam konflik.

Kedua, penyelesaian konflik dilakukan dengan bersandar pada mekanisme keperdataan melalui perjanjian, bukan mekanisme penyelesaian secara publik melalui kebijakan publik. Mekanisme penyelesaian konflik secara keperdataan melalui perjanjian (apalagi dilakukan oleh elit yang tidak berkaitan langsung dengan konflik) jelas rawan penyelewengan dan pengingkaran. Prinsip pokok perjanjian keperdataan adalah “*pacta sunt servanda*”, artinya perjanjian hanya mengikat para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Ruang keterlibatan negara dalam penegakan aturan-aturan perjanjian damai jelas sangat terbatas. Berbeda misalnya jika proses penyelesaian “dibungkus” dalam kebijakan publik, seperti Peraturan Daerah di tingkat Kabupaten/Kota atau di tingkat Provinsi).

Ketiga, inisiatif dan prakarsa penyelesaian konflik bersumber dari pejabat pemerintah pusat, khususnya Jusuf Kalla sebagai Menkokesra, serta Menkopolkam Susilo Bambang Yudhoyono, Kapolri, dan Panglima TNI. Hal ini

menunjukkan lemahnya keinginan aktor-aktor sesungguhnya dari konflik untuk melakukan resolusi.

Keempat, penyelesaian konflik tidak melibatkan aktor-aktor kunci yang merepresentasikan berbagai pihak yang terlibat dalam konflik, baik aktor internal maupun aktor eksternal. Sebagai catatan, seperti yang telah diakui dan diketahui publik, konflik Ambon tidak saja melibatkan aktor-aktor kelompok massa dengan agama berbeda di tingkat lokal, namun juga melibatkan berbagai elemen konflik lain dari luar Ambon.

Kelima, tahapan-tahapan pokok dalam penyelesaian konflik tidak konkrit sehingga langkah-langkah pemulihan di lapangan tidak seperti yang digambarkan dalam naskah Perjanjian Damai.

Keenam, tahapan pokok penyelesaian konflik yaitu Perjanjian Damai dilakukan di tempat lain di luar Ambon, tepatnya di Malino Sulawesi Selatan. Hal itu tidak saja menggambarkan kesulitan geografis dan kontekstual konflik, tetapi juga menunjukkan tidak tulus atau rendahnya komitmen para pihak riil di lapangan untuk terlibat dalam tahap-tahap resolusi konflik.

Ketujuh, pemisahan kampung Muslim dan Kristiani di Ambon menyebabkan isolasi kultural dan peningkatan intensitas eksklusivitas masing-masing pihak. Setiap friksi yang mungkin muncul di tengah-tengah masing-masing pihak sangat mungkin untuk mendapat justifikasi massal dari masing-masing pihak, bahkan justifikasi yang sifatnya artifial pun dimungkinkan.

Belajar dari keberhasilan penyelesaian konflik di Sampit, ada beberapa hal yang bisa dilakukan dalam fase yang sudah sejauh ini di Ambon. Beberapa prinsip yang dapat diadaptasi dari resolusi konflik di Sampit, serta dikontekstualisasi dengan konteks sosio-politik di Ambon kini, sebagai berikut: 1) Penekanan politik rekognisi bagi berbagai pihak yang terlibat dalam konflik. Secara kultural masing-masing pihak harus berada pada posisi mengakui identitas dan eksistensi pihak lain. Setelah rekognisi itu hadir secara kultural, negara melibatkan diri dalam kebijakan politik untuk menjamin penegakan pengakuan tersebut secara riil dengan kerangka penegakan yuridis.

2) Proses kultural dalam resolusi konflik sangat dibutuhkan. Karena itu keterlibatan aktor-aktor kultural kunci secara langsung dalam proses penyelesaian merupakan prakondisi yang tidak bisa ditawar-tawar. 3) Secara teknis, meskipun didasari penyelesaian secara kultural melalui keterlibatan dan negosiasi-negosiasi antar aktor-aktor kultural, penyelesaian konflik harus dituangkan dalam bentuk dokumen kebijakan publik, sehingga memungkinkan pemerintah dan aparat keamanan sebagai *state agencies* untuk menegakkan aturan-aturan jika terjadi potensi pengingkaran dari salah satu pihak.

3) Peleburan kehidupan sosial secara lintas kelompok dapat meminimalisasi ketegangan kultural yang sangat sering muncul. Maka harus diupayakan pengambilan keputusan politik dalam bentuk kebijakan publik untuk menciptakan tata pemukiman yang lebih inklusif. Pemisahan kampung muslim dan kristiani sangat rentan (*vulnerable*) menimbulkan bibit-bibit konflik. Pemisahan pemukiman mestinya hanya bersifat sementara untuk memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk melakukan refleksi dan *cooling-down*. Tetapi dalam jangka panjang harus diupayakan penataan pemukiman yang inklusif dan meleburkan kelompok-kelompok yang sebelumnya bertikai dalam kesatuan yang berdampingan secara damai (*peaceful co-existence*).

G. Model Generik Penyelesaian Konflik

Berdasarkan pada pengalaman penyelesaian konflik multikultural di tiga daerah (Sampit, Poso, dan Ambon) dengan berbagai tingkat capaian masing-masing—Konflik Sampit secara relatif selesai, sedangkan Ambon dan Poso masih memendam potensi konflik secara laten—dapat dirumuskan model generik resolusi konflik multikultural. Beberapa komponen inti model tersebut dapat dijelaskan dalam poin-poin berikut ini:

1. Pendekatan yang digunakan dalam model penyelesaian konflik multikultural adalah politik rekognisi atau politik pengakuan. Politik rekognisi memberikan ruang bagi masing-masing pihak yang berkonflik untuk mempertahankan eksistensi dan identitas masing-masing. Selain itu, penyelesaian tersebut juga berangkat dari inisiatif masing-masing

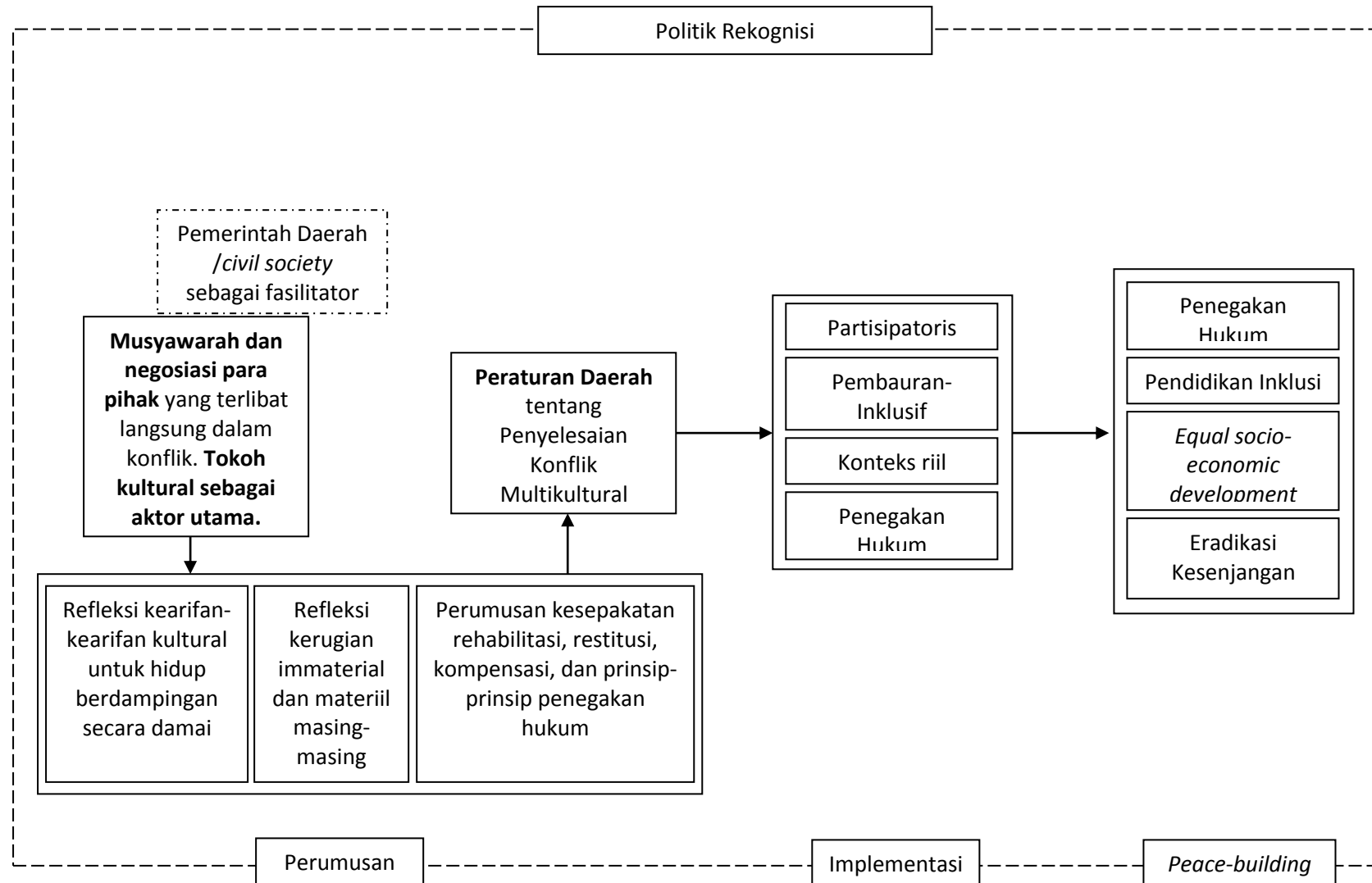
pihak dengan menonjolkan kearifan kultural dan nilai-nilai luhur masing-masing. Inisiatif tersebut kemudian dibungkus dalam kebijakan publik, sehingga memberikan kewenangan kepada pejabat publik beserta para aparatnya untuk ikut menegakkan hukum atas pelanggaran yang terjadi.

2. Dalam proses perumusan kebijakan penyelesaian, pemerintah daerah mendorong pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam konflik untuk bertemu secara langsung dalam konteks ruang konflik untuk mengedepankan nilai-nilai luhur sosio-kultural masing-masing untuk saling mengakui eksistensi pihak lawan.
3. Selain itu, Pemerintah daerah memfasilitasi tokoh-tokoh kultural masing-masing pihak untuk menggunakan kearifan kultural masing-masing untuk merefleksikan kerugian materiil dan immaterial akibat konflik.
4. Di samping itu, pemerintah daerah juga memfasilitasi rembuk tokoh-tokoh kultural masing-masing pihak yang berkonflik untuk menemukan titik-titik temu kultural agar masing-masing pihak saling mengakui eksistensi masing-masing dan dengan itu bisa hidup berdampingan secara damai.
5. Dalam tahap ini, pemerintah juga memfasilitasi masing-masing pihak untuk mengidentifikasi kerugian-kerugian materiil yang diakibatkan oleh konflik, kemudian merumuskan penggantian kerugian, baik dalam bentuk kompensasi maupun restitusi. Termasuk juga penegakan hukum atas tindak pidana yang menyebabkan timbulnya kerugian immaterial (fisik, psikis, dan nyawa).
6. Hasil-hasil kesepakatan kultural tersebut merupakan sumber material utama dalam penyusunan kebijakan publik, misalnya dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau Provinsi, juga dalam bentuk Peraturan Bupati/Walikota atau Gubernur.
7. Kebijakan publik tersebut diimplementasikan secara partisipatif dengan melibatkan para pihak yang terlibat secara langsung sebagai aktor utama.

8. Kebijakan publik tersebut diimplementasikan secara inklusif dengan tetap membaurkan pihak-pihak langsung dalam kehidupan sosio-ekonomi-kultural yang berdampingan.
9. Pemeliharaan suasana damai pasca keluarnya kebijakan dilakukan melalui penegakan hukum, pendidikan inklusif, pembangunan sosial-ekonomi yang setara (*equal*) dan dengan meminimalisasi kesenjangan sosio-ekonomi-politik antar pihak.

Gambar 1.

Model Generik Penyelesaian Konflik Multikultural



H. Kesimpulan dan Saran

Dari pembahasan dan ulasan pada bab sebelumnya dapat dirumuskan dua kesimpulan yang disesuaikan dengan tujuan penelitian ini: *Pertama*, penyelesaian konflik di Sampit melalui Kebijakan Publik dalam bentuk perda secara partisipatif, dengan inisiatif-inisiatif kultural dari bawah, dan tekad kultural untuk hidup berdampingan secara damai telah menghasilkan penyelesaian konflik dengan tingkat keberhasilan yang secara relatif jauh lebih berhasil daripada Konflik Poso dan Ambon. Penyelesaian konflik di Ambon dan Poso belum sepenuhnya berhasil dan secara relatif berada di bawah tingkat keberhasilan penyelesaian Konflik Sampit. Konflik di Poso dan Ambon melibatkan inisiatif pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang sangat besar. Penyelesaian konflik dengan demikian bersifat *top-down*. Inisiatif dan partisipasi para pihak dalam penyelesaian konflik relatif lemah, di sisi lain keterlibatan pihak ketiga cukup besar, termasuk anasir-anasir yang meningkatkan eskalasi konflik. Konflik dipungkasi dengan pemilahan secara eksklusif aspek-aspek sosio-ekonomi dan domisili pihak-pihak yang berkonflik.

Kedua, model penyelesaian konflik multikultural secara permanen yang dapat digunakan dengan belajar dari konflik di tiga daerah adalah model resolusi konflik dengan pendekatan politik rekognisi. Filosofi pendekatan ini adalah partisipatori, *from-bottom-initiative*, kebijakan publik sebagai mekanisme payung, inklusif, dan *peaceful co-existence*.

Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat diusulkan beberapa saran: 1) Kepada pemerintah pusat dan daerah: hendaknya mengedepankan pendekatan politik rekognisi dalam penyelesaian konflik multikultural yang terjadi di Indonesia, yaitu dengan megedepankan fasilitasi untuk mengakomodasi inisiatif-inisiatif kultural dari bawah, menuangkan kesepakatan-kesepakatan kultural dari bawah dalam kebijakan publik yang memungkinkan setiap pihak hidup berdampingan secara damai. 2) Kepada perguruan tinggi dan masyarakat sipil: Hendaknya melakukan diseminasi penyelesaian konflik secara partisipatoris, berwatak *bootom-up*, dan berfokus pada inklusi secara sosio-ekonomi-politik. 3) Kepada peneliti lain: Hendaknya melakukan penelitian lain lebih lanjut untuk

memperkuat *state of the art* penyelesaian konflik multikultural khas Indonesia dan berkontribusi menyelesaikan konflik-konflik multikultural yang terjadi di Indonesia yang majemuk.[]

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 1983. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: PT Bina Aksara.
- Bickmore, Kathy. 2003. "Conflict Resolution Education: Multiple Options for Contributing to Just and Democratic Peace", dalam Pammer, William J, Jr. dan Killian, Jerri (eds.). 2003. *Handbook of Conflict Management*. New York: Marcel Dekker Inc
- Boege. Volker. "Traditional Approaches to Conflict Transformation: Potentials and Limits". dalam *Berghof Handbook of Conflict Transformation*, www.berghof-handbook.net diakses pada tanggal 23 Agustus 2010
- Charles O. Jones, 1991, *Pengantar Kebijakan Publik* (Terjemahan), Jakarta: Rajawali Press.
- Costas Douzinas, 2003, "Identity, Recognition, Rights or What Can Hegel Teach Us bout Human Rights?" dalam *Journal of Law and Society*, Volume 29, Number 3, September , hlm. 380.
- David L. Sills, 1966, *The Government of Associations: Selections from the Behavioral* Totowa, NJ: Sciences Publisher & The Bedminster Press.
- Deutsch, Morton dan Coleman, Peter T, 2000, *Handbook of Conflict Resolution: Theory and Practice*. San Fransisco: Jossey-Bass Publishers
- Galtung. Johan. 2007. "Introduction: Peace by Peaceful Conflict Transformation —A Transcend Approach", dalam Webel, Charles dan Galtung, Johan (eds.). 2007. *Handbook of Peace and Conflict Studies*. London and New York: Routledge,
- Hegel. 1977. *The Phenomenology of Spirit, Chapter 4*. Oxford: Oxford University Press.
- Moffit, Michael L. dan Bordone. Robert C. 2000. *The Handbook of Dispute Resolution*. San Fransisco, CA: Jossey-Bass A Willey Imprint

- Moleong, Lexy. J., 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cetakan ke-14. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Parekh, Bhikku, 2000, *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory*. Cambridge, Massachusset: Harvard University Press.
- Pickering, Peg. 2000. *How to Manage Conflict: Turn All Conflicts into Win-Win Outcomes*. Franklin Lakes, NJ: Career Press
- Schmid, Alex P. 1998. "Indicator Development: Issues in Forecasting Conflict Escalation", dalam Davies dan Gurr (eds.). 1998. *Preventive Measures: Building Risk Assessment and Crisis Early Warning Systems*. Maryland, USA: Rowman and Littlefield Publishers Inc
- Schmeidl, Susanne dan Jenkins, J. Craig. "Early Warning Indicators of Forced Indicators", dalam Davies dan Gurr (eds.), 1998, *Preventive Measures: Building Risk Assessment and Crisis Early Warning Systems*. Maryland, USA: Rowman and Littlefield Publishers Inc
- Suharno, 2006, "Konflik, Etnisitas, dan Integrasi Nasional" , Makalah disampaikan dalam *Seminar dan Lokakarya Resolusi Konflik* pada Civics Community DIY tanggal 18 dan 20 November tahun 2006 di Universitas Negeri Yogyakarta.
- Suharno, 2010, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, 2010, Yogyakarta: UNY Press.
- _____, 2011, Politik Rekognisi dalam Peraturan Daerah tentang Penyelesaian Konflik di dalam Masyarakat Multikultural, Disetasi: UGM Yogyakarta
- Viswanathan Rudrakumaran , 1999, *The Need for Third Party Conflict Resolution in the Island of Sri Lanka*, Proceedings of International Conference On Tamil Nationhood & Search for Peace in Sri Lanka, Ottawa, Canada.
- Winarno, Budi., 1989, *Teory Kebijakan Publik*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Pusat Antar Universitas-Stusi Sosial UGM.